

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TALAWÉ

¹Riska Sabir, ²Ahmad Mustanir, ³Akhmad Yasin, ⁴Firman, ⁵Wahyudi Sofyan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Riskasabir28@gmail.com
Ahmadmustanir74@gmail.com
Firmanramadhan.thosuppa@gmail.com
Wahyudisofyan09@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, adapun Populasi penelitian ini adalah sebanyak 308 orang, Sedangkan sampel penelitian yaitu berjumlah 79 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik (1). Observasi, (2). Kuesioner, (3). Dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan menggunakan aplikasi SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas pemerintah Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikategorikan baik dengan persentase 70,5%, sedangkan pada Faktor-faktor Akuntabilitas Pemerintah Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng kurang baik dengan persentase 46,6%.

Kata Kunci: Akuntabilitas pemerintah, Alokasi Dana Desa.

Abstract

The purpose of this study is to determine the accountability of the village government in the management of village funds in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency, then to determine the factors that affect Village Government Accountability in Village Fund Management in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency. The research method used in this research is descriptive quantitative research, while the population of this study is 308 people, while the research sample is 79 people. The data collection technique used in this research is to use technique (1). Observation, (2). Questionnaire, (3). Documentation. The collected data was then analyzed using a frequency table and using the SPSS 21 application. The results of this study indicate that the accountability of the village government in Sidenreng Rappang Regency can be categorized as good with a percentage of 70.5%, while the Accountability Factors of the Talawe Village Government, Watang Sidenreng District, Sidenreng Regency is not good with a percentage of 46.6%.

Keywords: Government accountability, Village Fund Budget.

A. PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa tercantum didalamnya mekanisme penghimpunan serta pertanggung jawaban merujuk pada undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta pemerintah wilayah. dalam peraturan tersebut dipaparkan bila pendanaan pembangunan yang dicoba oleh pemerintah desa menganut *money follows function* yang berarti bila pendanaan menjajaki guna pemerintahan yang jadi kewajiban serta tanggung jawab tiap- masing- masing- tingkatan pemerintahan. Dengan keadaan tersebut hingga transfer dana jadi berarti buat melindungi ataupun menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002) Konsekuensi dari statment tersebut yakni desentralisasi kewenangan wajib di sertai dengan desentralisasi fiskal.

Munculnya otonomi daerah telah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan terpusat ke sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menciptakan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, serta menguasai dan mengurus kepentingan penduduk lokal di berbagai daerah. cara. Kondisi dan kemampuan daerah. Tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada warga negara, serta untuk memajukan pembangunan persatuan politik dan kesatuan etnis. Berhubungan langsung dengan Indonesia Bersama masyarakat peran pemerintah desa harus fokus pada kerja pemberdayaan. Sehingga untuk mengukur kesuksesan suatu pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa penyelenggaraan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penyelenggaraan keuangan desa tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk

melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa khususnya.

Keberadaan desa sebagai tempat terwujudnya kawasan kehidupan dan peradaban penduduk yang memiliki kedudukan dalam penataan ruang. Penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah, daya tampung sumber dayanya (SDA, SDM, atau sumber energi buatan), luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana dan sarana pemerintahan, serta kondisi sosial budaya. dari penduduk. Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "suatu kesatuan warga negara hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk menguasai dan mengurus kepentingan penduduk setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Yuliansyah. 2016).

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya membangun/memperbaiki desa dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik dan non fisik desa. Dengan dukungan tersebut diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat desa, dimana semua pihak dalam masyarakat desa ikut andil dalam pembangunan desanya. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat menuju kondisi masyarakat yang mandiri.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya bisa mencerminkan komitmen pemerintah wilayah buat melakukan pemerintahan yang tidak mempertaruhkan kepentingan publik (*public sphere*). Perihal ini hendak mendesak pemerintah wilayah buat betul-betul meningkatkan strategi pembangunan wilayah bersumber pada kemampuan yang dimilikinya. Tetapi pada

realitasnya pada Desa Talawe belum pas target, alokasi dana desa terhadap kemampuan desa dapat di amati dari banyaknya pengangguran yang terdapat di desa sementara itu kemampuan desa lumayan menjanjikan dan para birokrat desa lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur desa sehingga sebagian dana yang digunakan semestinya buat pemberdayaan warga.

Penjelasan tersebut diatas penulis melaksanakan riset dengan mengambil judul ialah Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan bahwa Desa Talawe merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sjahrudin Rasul (2001) memberi tahu jika akuntabilitas didefinisikan secara kecil sebagai kemampuan buat bagikan jawaban kepada otoritas yang lebih besar atas aksi seseorang maupun sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas maupun dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, seseorang tersebut ialah pimpinan lembaga pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat maupun publik sebagai pemberi amanat.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja. Dari bermacam definisi akuntabilitas semacam tersebut di atas, bisa disimpulkan kalau akuntabilitas ialah perwujudan kewajiban seorang ataupun unit organisasi buat mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber energi serta penerapan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggungjawaban berbentuk laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Dari penafsiran akuntabilitas tersebut, menimbulkan 2 penanda ialah : tanggung jawab serta efisiensi.

Admosudirjo (2005) menitik beratkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Moekijat (2000:1), menyatakan bahwa untuk mengukur akuntabilitas pemerintah Desa dapat dilakukan dengan menggunakan Indikator-indikator sebagai berikut : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dan Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, ada beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pengelolaan ADD.

B. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah yaitu cara menerapkan prinsip logis terhadap pengesahan dan penjelasan kebenaran atau cara ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu guna memecahkan masalah. Adapun penelitian ini yaitu mrnggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang sedang diteliti. Dasar penelitian yang dilakukan ini adalah survei dimana kegiatan penelitian ini menggunakan kuisioner, observasi dan studi pustaka sebagai instrument utama dalam pengumpulan data dilapangan. Kemudian adapun macam metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan diintrepretasikan, bentuknya berupa survey dan studi perkembangan.

Kemudian pendekatan penelitian di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alat yang digunakan untuk pemecahan masalah dengan pendekatan penelitian statistik menggunakan bantuan aplikasi"spss.(Ma'ruf, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil observasi, koesioner, dan Documentasi yang disebar kepada responden maka dapat diperoleh

jawaban dari akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di desa talawe kecamatan watang sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

Perencanaan Anggaran Dana Desa Yang Dilakukan Pemerintah Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah yang menjawab sangat baik 23% orang, yang menjawab baik 42% orang, yang menjawab cukup baik 15% orang, yang menjawab kurang baik 9% orang dan yang menjawab sangat tidak baik 11% orang. Maka, berdasarkan data perencanaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan jumlah rata-rata persentase 72% dari 100% yang diharapkan.

Pengorganisasian Anggaran Dana Desa Yang Dilakukan Pemerintah Desa Di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah yang menjawab sangat baik 13% orang, yang menjawab baik 45% orang, yang menjawab cukup baik 24% orang, yang menjawab kurang baik 9% orang dan yang menjawab sangat tidak baik 9% orang. Maka, berdasarkan data pengorganisasian anggaran dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan jumlah rata-rata persentase 68% dari 100% yang diharapkan.

Penggerakan Anggaran Dana Desa Yang Dilakukan Pemerintah Desa Di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah yang menjawab sangat baik 27% orang, yang menjawab baik 35% orang, yang menjawab cukup baik 23% orang, yang menjawab kurang baik 5% orang dan yang menjawab sangat tidak baik 10% orang. Maka, berdasarkan data penggerakan Anggaran Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan jumlah rata-rata persentase 72% dari 100% yang diharapkan.

Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Yang Dilakukan Pemerintah Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil

pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah yang menjawab sangat baik 27% orang, yang menjawab baik 30% orang, yang menjawab cukup baik 24% orang, yang menjawab kurang baik 13% orang dan yang menjawab sangat tidak baik 6% orang. Maka, berdasarkan data pelaksanaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan jumlah rata-rata persentase 70% dari 100% yang diharapkan.

Faktor-Faktor Pengawasan Anggaran Dana di Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah yang menjawab sangat berpengaruh 4% orang, yang menjawab berpengaruh 14% orang, yang menjawab kurang berpengaruh 29% orang, yang menjawab tidak berpengaruh 33% orang dan yang menjawab sangat tidak berpengaruh 20% orang. Maka, berdasarkan data mengenai faktor pengawasan Anggaran Dana Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang, dikategorikan berpengaruh dengan jumlah rata-rata persentase 48% dari 100% yang diharapkan.

Faktor-Faktor Kemampuan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Anggaran Dana Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah di atas mengenai faktor-faktor kemampuan pelaksanaan kegiatan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Anggaran Dana Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah yang menjawab sangat berpengaruh 3% orang, yang menjawab berpengaruh 13% orang, yang menjawab kurang berpengaruh 22% orang, yang menjawab tidak berpengaruh 37% orang dan yang menjawab sangat tidak berpengaruh 27% orang. Maka, berdasarkan data mengenai faktor-faktor kemampuan pelaksanaan kegiatan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Anggaran Dana Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang, dikategorikan berpengaruh dengan jumlah

rata-rata persentase 45,4% dari 100% yang diharapkan.

Faktor-Faktor Kemampuan Pelaksana Kebijakan Anggaran Dana Desa Dalam Menyelesaikan Pelaksanaanya di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah mengenai faktor-faktor kemampuan pelaksana kebijakan Anggaran Dana Desa dalam menyelesaikan pelaksanaanya di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah yang menjawab sangat berpengaruh 8% orang, yang menjawab berpengaruh 16% orang, yang menjawab kurang berpengaruh 18% orang, yang menjawab tidak berpengaruh 25% orang dan yang menjawab sangat tidak berpengaruh 33% orang. Maka, berdasarkan data mengenai factor-faktor kemampuan pelaksana kebijakan Anggaran Dana Desa dalam menyelesaikan pelaksanaanya di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang, dikategorikan berpengaruh dengan jumlah rata-rata persentase 46,4% dari 100% yang diharapkan.

Faktor-Faktor Kelengkapan Sarana di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah mengenai faktor-faktor kelengkapan sarana di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah yang menjawab sangat berpengaruh 6% orang, yang menjawab berpengaruh 10% orang, yang menjawab kurang berpengaruh 22% orang, yang menjawab tidak berpengaruh 43% orang dan yang menjawab sangat tidak berpengaruh 19% orang. Maka, berdasarkan data Tanggapan responden mengenai faktor-faktor kelengkapan sarana di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang, dikategorikan berpengaruh dengan jumlah rata-rata persentase 48,2% dari 100% yang diharapkan.

Faktor-Faktor Kelengkapan Prasarana di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah mengenai faktor-faktor kelengkapan prasarana di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 79

responden adalah yang menjawab sangat berpengaruh 3% orang, yang menjawab berpengaruh 11% orang, yang menjawab kurang berpengaruh 18% orang, yang menjawab tidak berpengaruh 41% orang dan yang menjawab sangat tidak berpengaruh 28% orang. Maka, berdasarkan data Tanggapan responden mengenai faktor-faktor kelengkapan prasarana di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang, dikategorikan berpengaruh dengan jumlah rata-rata persentase 44% dari 100% yang diharapkan.

Faktor-Faktor Dukungan Masyarakat Terhadap Kebijakan Anggaran Dana Desa Berupa Tenaga Dan Material. Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah faktor-faktor dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material, menunjukkan bahwa dari jumlah 79 responden adalah yang menjawab sangat berpengaruh 6% orang, yang menjawab berpengaruh 13% orang, yang menjawab kurang berpengaruh 22% orang, yang menjawab tidak berpengaruh 32% orang dan yang menjawab sangat tidak berpengaruh 3% orang. Maka, berdasarkan data Tanggapan responden mengenai faktor-faktor dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material, dikategorikan berpengaruh dengan jumlah rata-rata persentase 48% dari 100% yang diharapkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti merumuskan secara umum kesimpulan bahwa :

1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Akuntabilitas pemerintah Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng di Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi : Perencanaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang (72%), Pengorganisasian Anggaran Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang (68%), Penggerakan Anggaran Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang (72%) dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa di

Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang (70%), maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 70,5% kategori baik atau efektif.

2. Faktor-faktor Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang. Faktor-faktor akuntabilitas Pemerintah Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi : pengawasan anggaran dana desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang (48%), kemampuan pelaksanaan kegiatan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Anggaran Dana desa di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang (45,5%), kemampuan pelaksana kebijakan Anggaran Dana Desa dalam menyelesaikan pelaksanaannya di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang (46,4%), kelengkapan sarana di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang (48,2%), kelengkapan prasarana di Desa Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang (44%) dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material (48%), maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 46,6% kategori kurang baik atau kurang efektif.

E. REFERENSI

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dedi Sudirman, M. I. (2021). Peranan Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Badan USaha Milik Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA*, 73-77.
- Edy, M. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Herawati, L. A. (2021). Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Pengelolaan Dana Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 9-17.
- Keban, Y. T. (2004). *Administrasi Publik, Konsep Strategi Enam Dimensi Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mitra Megawati Martan, A. A. (2021). Akuntabilitas Kinerja Pegawai terhadap Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bulu Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 105-109.
- Muhammad, M. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia yang Unggul, Cerdas Dan Berkarakter Islami*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nawawi, H. (2005). *Metode Bidang Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Nurhatifa, M. R. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Lagading Masa Pandemi Covid-19. *JIA*, 173-177.
- Prijono. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Sashkin. (2011). *Prinsip-prinsip Kepemimpinan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2012). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian Kuantitatif, Kuantitatifdan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahyudding Muhlis, S. (2021). Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA*, 33-37.